Implementasi Kurikulum Pendidikan Islam Inklusif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Sulaiman Ismail, Sulaiman W.
Pasca Sarjana IAIN Langsa, Indonesia

*Korespondensi: sulaiman@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

The value of pluralism needs to be implemented in the Islamic religious education curriculum. A tolerant value education curriculum teaches understanding and efforts to be able to live in an environment of religious and cultural differences. This study aims to describe data obtained from three State Islamic Religious Universities in Aceh (IAIN Langsa, IAIN Lhokseumawe, and STAIN Gajah Putih Takengon) regarding the implementation of an inclusive Islamic education curriculum implemented in these three institutions. Data was collected through observation, interviews, and review of documents related to the curriculum. The results of this study indicate that education with a pluralist style is carried out in the following way; (1) Recognizing the diversity of backgrounds of each lecturer and student with their differences; (2) Specifically encouraging each lecturer and student to respect each other; (3) Open access to participation in understanding moderation for students. The implementation of an inclusive-based curriculum still tends to be implemented in the form of a hidden curriculum, while the implementation of the formal curriculum is still limited in providing several courses. Factors supporting the implementation of inclusive education are the existence of program regulations proclaimed by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia while the inhibiting factors arise from misunderstandings and negative stigma that arise from within the community.

Keywords: Strategy, Pluralism, Islamic Inclusive PTKIN and Curriculum

ABSTRAK

Nilai pluralisme perlu diterapkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan yang bernilai toleran mengajarkan pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam lingkungan perbedaan agama dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh (IAIN Langsa, IAIN Lhokseumawe, dan STAIN Gajah Putih Takengon) mengenai implementasi kurikulum pendidikan Islam inklusif yang diterapkan di ketiga institusi tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen yang terkait dengan kurikulum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan bercorak pluralis dilaksanakan dalam cara; (1) Mengakui keberagaman latar belakang dari tiap-tiap dosen dan mahasiswa dengan keberbedaannya; (2) Mendorong secara spesifik agar tiap-tiap dosen dan mahasiswa untuk saling menghargai; (3) Membuka akses partisipasi pemahaman moderasi bagi mahasiswa. Penerapan kurikulum berbasis inklusif masih cenderung dilaksanakan dalam bentuk *hidden curriculum*, sementara pelaksanaan kurikulum formal masih terbatas dalam pemberian beberapa mata kuliah. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif adalah adanya peraturan program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI sementara faktor penghambat muncul dari kesalah pahaman dan stigma negatif yang muncul dari tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Pluralisme, Islam Inklusif PTKIN dan Kurikulum

A. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki peran penting dalam mengelola bangsa yang beragam seperti Indonesia. Hal ini karena perguruan tinggi adalah tempat sumber ilmu pengetahuan tertinggi yang dapat mengayomi pendidikan yang lebih rendah pada tingkatannya. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki andil dalam menertibkan perkembangan pemikiran yang liar yang dapat menimbulkan radikalisme yang terus menjalar secara masif di kalangan pelajar. Wacana ini penting untuk di ketengahkan, karena “salah satu sumber berkembangnya radikalisme adalah terdapat pada ranah pendidikan” (Febriyanto 2021), karena lembaga pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan alur pikir peserta didiknya (Sulaiman W. 2022a).

Sebagai lembaga pendidikan tertinggi yang dapat mencerahkan alur pikir pemahaman masyarakat, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tentu sudah memiliki tempat di hati masyarakat, sehingga banyak mahasiswa sebagai pelajar yang datang untuk menggali ilmu keislaman, baik yang datang dari pedesaan terpencil maupun dari perkotaan. Atas dasar pemikiran ini, maka dapat dikatakan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan sangat strategis dalam memperbaiki moral Islami bagi kehidupan masyarakat.

Kedudukan strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diharapkan dapat membawa dampak nilai-nilai Islam hakiki yang tidak hanya paham tentang keagamaan yang membawa rahmat, namun juga bagaimana dapat terlaksana implementasi teori agama tersebut dalam praktek sehari-hari, sehingga melahirkan budi luhur (akhlakul karimah) pada setiap muslim. Oleh karena itu, “pemerintah melalui menteri agama meminta kepada lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) untuk menjadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama” (Sulaiman W 2022d). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan; “upaya pelebagaan moderasi beragama perlu kontribusi konkrit dari PTKIN sebagai pusat moderasi dalam perspektif Islam. PTKIN harus mampu menjadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama. Karenanya, PTKIN dituntut menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu isu utama dalam aktifitas belajar mengajar, riset, dan pengabdian masyarakat, dengan fokus pada kajian keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan” (Qoumas 2021).

Jalal dkk. berpendapat bahwa, pendidikan Islam berwawasan global berkarakter agama budaya tidak serta merta membangun secara gamblang. Bersamaan dengan adanya kewajiban dalam upaya untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai agama, Fasli dan Desi melihat bahwa dalam membangun pendidikan “Islam Universal” juga perlu

memperhatikan aspek dari keragaman budaya, dan karakter budaya nasional dan global (Supriadi, 2001).

Ghazali menambahkan, perhatian terhadap aspek budaya dan karakter bangsa Indonesia yang beragam dalam mewujudkan pendidikan Islam yang bersifat global dan universal diasumsikan penting oleh akademisi. Adeng Muchtar beralasan bahwa karena perbedaan budaya, agama, aspirasi politik, kepentingan, visi dan misi, keyakinan dan tradisi merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal yang kadang-kadang juga menjadi perbedaan perilaku dalam memahami sesuatu, dan dapat menjadi pemantik kekisruhan etnis yang merebak di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal semacam ini, dalam pandangan mereka, merupakan bagian dari problematika yang di hadapi negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Bahkan di akhir rezim orde baru kekisruhan etnis yang terjadi diasumsikan sebagai akibat dari rendahnya kesadaran dan wawasan multikulturalisme (Adeng Muchtar Ghazali 2008). Hal ini menjadi kendala dan masalah konkret yang perlu diatasi, supaya tidak berakibat kepada perencanaan yang telah disusun akan mengalami penyesuaian-penyesuaian di lapangan karena kondisi sosial, budaya, ekonomi, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat yang berbagai ragam (H.A.R.Tilaar 2010).

Terkait hal tersebut, maka dialog mengenai kerukunan dalam beragama atau identitas penganut agama dalam konteks pendidikan menjadi sangat penting untuk dikaji, diteliti, sehingga fenomena pluralisme agama dan budaya dapat dipahami, diluruskan, dan ditindak lanjuti dalam aktivitas kehidupan beragama, sehingga dialog tersebut dapat dijadikan atau menjadi landasan ketika bersinggungan dan berhadapan dengan para penganut yang berbeda keyakinan. Apalagi dialog yang dilakukan didasari oleh nilai akademis (intelektual), pengalaman dan kesadaran dalam beragama. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari akhlakul karimah. Akhlak dianggap sangat penting, akhlak menjadi sasaran utama dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (Ainiyah, 2013), karena akhlak dianggap sebagai dasar bagi keseimbangan kehidupan manusia yang menjadi penentu keberhasilan.

Berangkat dari fenomena di atas, maka perlu adanya penyisipan nilai-nilai pluralisme dan keragaman budaya bangsa pada kurikulum pendidikan agama Islam guna mengatasi primordialisme dan eksklusifisme kelompok agama dan budaya yang sempit. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan penyajian kurikulum dan manajemen berbasis Islam inklusif. dengan adanya pendidikan pluralisme diharapkan civitas akademika dapat tertanam nilai-nilai toleransi antarumat beragama. Uraian tersebut membuat penulis untuk tertarik untuk meneliti

Strategi penerapan kurikulum berbasis Islam inklusif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Adapun tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah: (a) memahami strategi penerapan kurikulum berbasis Islam inklusif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, (b) mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan kurikulum berbasis Islam inklusif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Ruang lingkup penelitian ini hanya berada pada aspek implementasi kurikulum berbasis pendidikan Islam inklusif, yang dilaksanakan pada 3 perguruan tinggi yang ada di Aceh, yaitu: IAIN Langsa, IAIN Lhokseumawe, dan STAIN Gajah Putih Takengon. Kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang telah disiapkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kurikulum ini disebut juga kurikulum formal atau kurikulum tertulis (*written curriculum*).

Hal ini menarik untuk dianalisa lebih jauh mengingat Aceh adalah provinsi yang homogenitas keislamannya paling tinggi di Indonesia dengan populasi Islam 98,19% dan sebanyak 6.020 desa berpopulasi satu agama (Statistik 2017). Selanjutnya penelitian ini melihat pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ada di Aceh. Dari pandangan inilah, peneliti menganggap gejala ini merupakan kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pluralisme

Istilah Pluralisme berasal dari akar kata "*plural*", "*plurality*", serta "*pluralistic*". Pluralisme bermakna lebih dari satu atau banyak (*for referring to more than one*) (Manser 1995). Selain itu, pluralisme juga diartikan sebagai suatu pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua unsur independent atau lebih. Pemaknaan pluralisme secara defenitif, sebagaimana disampaikan Wijaya-Mukti yaitu sebagai pemahaman atau kesadaran mengenai suatu ikatan kesatuan dalam arti tertentu bersama-sama dengan kesadaran akan keterpisahan dan perpecahan kategoris (Wijaya-Mukti 2003). Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak menganggap segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik dan religius (Shofan 2011). Kata pluralisme juga sering dinyatakan untuk memahami makna terkait ras, bangsa, agama dan sebagainya, yang mesti tinggal bersama sebagai kelompok.

Pemahaman bahwa “masyarakat kita majemuk”, beraneka ragam, “bersuku-suku dan beragama” belum cukup menyatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk pluralisme. Hal ini sekedar hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Dalam hal ini, istilah pluralisme tidak hanya dipahami sebagai *negative good* “kebaikan negatif”, atau hanya dilihat dari fungsinya untuk menghindari atau menyingkirkan fanatisme”. Istilah pluralisme hendaknya dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”. Oleh karena itu, Budhy melihat bahwa untuk menjaga keselamatan umat manusia, sangat berhubungan dengan pengawasan dan pengimbangan dari pluralisme (Rachman 2001). Demikian juga Imam Subkhan mengartikan pluralisme agama adalah setiap pemeluk agama diuntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan (Subkhan 2007). Hal ini menjadi penting untuk pemahaman, karena hidup tidak sendiri, hidup penuh keragaman yang multikultural, dan hal itu adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. “Multikultural adalah realita yang tidak terbantahkan, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebagian para ahli telah mendudukan multikulturalisme yang plural sebagai model. Hal ini mereka lakukan karena multikulturalisme diharapkan dapat membuat konstruksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi lebih baik” (Zainuddin & Sulaiman W 2022).

Dalam kerangka historis-teoritis, wujud pluralisme telah dipahami sebagai sebuah istilah filsafat semenjak 1882. Hingga 1919, pluralism juga menjadi istilah dalam kajian politik. Pluralism juga pernah dikenal dan dipahami sebagai sebuah kajian terkait pertentangan terhadap negara yang monolitik di tahun 1993. Makna pluralisme umumnya mengacu pada toleransi atas perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara dalam konteks filsafat, pluralism telah didedikasikan dan digunakan mulai abad pencerahan yakni abad ke 18 oleh Kant dan Wolf, dimana saat itu juga sering disebut sebagai titik mula muncul atau bangkitnya gerakan pemikiran modern. Teori-teori tentang pluralism terus berkembang semenjak filsafat Eropa dalam berbagai kajian dan disiplin ilmu mulai abad ke-19 hingga abad ke 20. Dalam dua decade tersebut, gagasan dan dialog terkait pluralism agama telah mencapai fase klimaksnya, sehingga menjadi wacana dan pemikiran tersendiri dalam khazanah teologi modern. Selanjutnya, memasuki abad ke-21, terjadi perluasan kata pluralism ke masyarakat terpelajar, yang berdampak pada munculnya istilah dan definisi yang beragam, baik secara eksplisit dan implisit yang tentu saja memerlukan klarifikasi-klarifikasi secara akademik.

Religious pluralism atau pluralism beragama secara fenomenologis menunjukkan sebuah fakta dan makna yang dalam mengenai praktek agama dan nilai-nilai keberagaman yang menampilkan suatu pluralitas tradisi dan berbagai varian masing-masing tradisi. Sementara, secara filosofis istilah tersebut berkaitan dengan teori hubungan antara berbagai tradisi. Teori tersebut membahas mengenai kaitan dan hubungan antar berbagai agama besar dunia terkait berbagai persepsi, konsepsi, dan respon tentang realitas ketuhanan yang penuh dengan misteri. Teori tersebut didekati paling tidak melalui dua bentuk utama, inklusivisme dan eksklusivisme (Eliade 1987).

Pemahaman terhadap pengertian pluralisme seperti tersebut di atas, terungkap dalam Surah Al-Baqarah (2): 251: *“Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur; namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam”*. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Allah memberi karunia dan rahmat yang sangat besar kepada seluruh manusia. Dia menghancurkan penyebar kebatilan dengan tentara kebenaran. Kalau kemudian muncul orang lalim yang lain, Allah mengirim kepadanya-pada waktu yang tepat-orang yang akan membebaskan manusia darinya. Demikianlah Allah memenangkan para rasul-Nya secara gaib, dan menyokong orang-orang yang beriman pada saat kritis yang dikehendaki-Nya (Az-Zuhaili 2013). Ini suatu penegasan, bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia.

Rasidi melihat bahwa dewasa ini, kesadaran tentang pemahaman dan hakekat pluralistik dan lintas budaya perlu diperhatikan. Bagaimana agar pemaknaan pluralistik berdampak pada pemahaman yang menunjukkan bahwa pluralistik tidak lagi hanya menunjukkan makna pada satu budaya, ideologi, maupun agama yang dapat mengklaim sebagai satu-satunya sistem yang unik dan bahkan terbaik dalam pengertian absolut. Rasidi juga melihat pentingnya memahami makna pluralistik sebagai kesadaran dan pemahaman terhadap lintas budaya, yaitu bahwa komunitas manusia tidak lagi hidup dalam sekat-sekat, sehingga setiap persoalan manusia saat ini yang tidak dilihat dalam parameter kemajemukan budaya adalah persoalan yang salah letak secara metodologis (M 1968).

Keyakinan seseorang yang mutlak dan absolut terhadap apa yang diyakini dan diimani merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme agama tak ada yang mempertentangkannya hingga muncul teori tentang relativisme agama. Pemikiran relativisme ini merupakan sebuah sikap pluralisme terhadap agama (Yusuf Mundzirin 2005).

Kemajemukan merupakan unsur penentu bagi adanya dan kekhasan dari suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam sejarah pembentukan dan kehidupan setiap kelompok masyarakat senantiasa ada kesadaran dan pengakuan akan adanya kemajemukan, serta ada komitmen untuk menerima dan tetap mempertahankan kemajemukan secara konsekuen dan konsisten (Osman 2006).

Sachedina juga menguraikan pentingnya pluralism, yaitu; (a) pluralisme dapat memberi inspirasi ide-ide pluralistik yang mengajarkan nilai-nilai moralitas serta cara berinteraksi dengan komunitas lain. (b) pluralism kontekstual sifatnya, sehingga pendidikan mengenai pluralism mampu menghapus sekat budaya, nasional, sehingga muncul universalitas yang berlandarkan kearifan dan moral *“live and let live”* (hidup dan membiarkan yang lain hidup). (c) Agama (Islam) mengajarkan tidak ada paksaan dalam beragama, namun upaya dialog terkait pluralism menjadi ajaran yang diperintahkan bagi setiap pemeluknya (Sachedina 2014).

Muhammad Quraishy Shihab mengemukakan terkait hal ini bahwa Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas dan bertanggungjawab. Di sini dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan memilih agama adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap insan (Shihab 2007).

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk (*plural society*) (Nasikun 2008; Sulaiman W 2022). Hal ini disebabkan oleh luas geografis Indonesia yang kurang lebih 3000 mil, membentang dari Timur ke Barat serta lebih dari 1000 mil jika ditarik dari titik Utara ke Selatan. Lebih lanjut, posisi Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Australia. Ditambah lagi dengan pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen (Ichtianto 2005).

Dari keyakinan terhadap realitas keragaman keberagaman tersebut, dapat dipahami bahwa untuk memahami pemahaman agama secara kontekstual boleh dilakukan dengan upaya memahami pluralitas agama dan budaya. Realita fenomena keragaman agama dan budaya masyarakat Indonesia menjadi khazanah dan kekayaan tersendiri bagi pengembangan dunia pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajemukan penduduk di Indonesia adalah pluralistik yang tidak terelakkan, sehingga permasalahan ini diakui dalam konstitusi dan telah dinyatakan adanya jaminan terhadap pemilik aliran dan pemeluk agama masing-masing. Dengan demikian, keberagaman tersebut apabila dipelihara dengan baik, maka akan menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia (AR et al. 2021). Namun di sisi lain, kemajemukan dapat membawa bencana dan mengandung potensi konflik jika tidak dapat dikelola dengan baik.

Kemajemukan dengan dalih demokrasi inilah dengan bermacam aliran masuk ke Indonesia, sehingga menjadi rebutan ideologi Islam yang transnasional (Suharto 2018).

2. Kurikulum dan Implementasinya di Perguruan Tinggi Keislaman

Sailor dan Alexander menjelaskan, *“curriculum is defined reflects volume judgments regarding the nature of education. The definition used also influences how curriculum will be planned and utilized”* (Alexander 1974). Penjelasan ini menunjukkan bahwa kurikulum adalah seperangkat perencanaan pembelajaran yang akan direalisasikan dalam proses pembelajaran. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dakir kurikulum itu memuat semua program yang dijalankan untuk menunjang proses pembelajaran. Program yang dituangkan tidak terpancang dari segi administrasi saja tetapi menyangkut keseluruhan yang digunakan untuk proses pembelajaran (Dakir 2004). Suryobroto menegaskan yang dimaksud kurikulum yaitu setiap pengalaman pendidikan yang dialami oleh anak didik yang diberikan di oleh tenaga pendidik baik di sekolah maupun di luar sekolah (Suryosubroto 2004). Sedangkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan (Arifin 2018).

Dengan demikian, “berbicara tentang kurikulum, bukan berarti hanya berbicara tentang buku atau bahan ajar apa saja yang harus diajarkan kepada peserta didik, atau hanya berbicara tentang aktivitas dalam proses pembelajaran, bagaimana metode atau strategi yang harus dilakukan tenaga pendidik agar peserta didik dapat menguasai bahan ajar yang diajarkan” (Sulaiman W 2022b). Namun lebih dari itu, “Sesungguhnya banyak hal dalam persoalan kurikulum, diantaranya termasuk persoalan tujuan dan arah pendidikan, persoalan materi dan tingkatannya dan persoalan lain yang menyangkut tentang hal itu. Oleh karena itu, persoalan kurikulum adalah persoalan yang bertautan dengan kepentingan seluruh masyarakat” (Sulaiman W 2022c) yang tidak terlepas dari manajemen dalam pengaturannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memiliki rencana yang diikuti dengan pelaksanaan, dan melakukan evaluasi dalam rangka mengawasi pelaksanaan sebagaimana yang direncanakan (Haekal et al. 2022). “Maksud dari semua kegiatan ini adalah untuk

memperoleh tingkat kemajuan yang baik yang harus tercapai sesuai tujuan organisasi pendidikan yang bersangkutan” (Sarifudin and Maya 2019).

Nurdiyantoro menilai kurikulum sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang berkaitan erat, tidak bisa terpisahkan antara satu sama yang lain. Nurdiyantoro menggaris bawahi bahwa keterkaitan hubungan antara pendidikan dan kurikulum adalah sebagai relasi tujuan dan isi pendidikan. Karena ada tujuan maka harus ada alat yang sama untuk mencapainya, dan cara untuk menempuh adalah kurikulum. Terkait pemahaman dan pandangan tentang kurikulum tersebut di atas, kurikulum diperguruan Tinggi Keislaman mencakup materi- materi pendidikan yang direncanakan dan diimplementasikan guna mewujudkan tujuan pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan dari pokok pembicaraan kurikulum tidak terlepas pada tiga dimensi pokok; (1) kurikulum sebagai substansi (pengalaman belajar), (2) kurikulum sebagai sistem, (perencanaan program pembelajaran) dan (3) kurikulum sebagai mata pelajaran (Ishak, I., & W. 2022).

C. METODE

Penelitian ini dilakukan di IAIN Langsa, IAIN Lhokseumawe dan STAIN Gajah Putih Takengon, Provinsi Aceh, Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Moleong 2002). Sugiyono menjelaskan, Penelitian Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *Postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono 2014), berfokus pada proses-proses yang terjadi atau hasil dan *outcome* (Creswell 2017).

Adapun yang menjadi sumber data berupa subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto 2006), meliputi dua jenis: *pertama* sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, kedua sumber data sekunder (Bungin 2005). Sumber data yang digunakan meliputi 3 P, yaitu: *Person, Places, Paper*. *Person* terdiri atas Wakil Rektor/Ketua yang membidangi akademik, dosen, dan mahasiswa. *Places*, menggambarkan fenomena dan dinamika yang terjadi di PTKI, seperti kondisidan suasana akademik. *Paper* berupa data teks meliputi sejumlah literatur untuk kajian teori,

silabus, dokumentasi evaluasi, dokumentasi penelitian terdahulu, jurnal ilmiah pendidikan, buku teks yang relevan dengan kajian pendidikan pluralisme dan pendidikan inklusif serta buku teks yang relevan dengan pendidikan secara deduktif.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari: (a) Pengamatan terlibat (*observasi partisipatif*) dimana peneliti menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan kelompok yang akan diteliti. (b) wawancara mendalam. (c) dokumentasi berbentuk dokumen tertulis yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini (Margono 2010) seperti, daftar referensi yang digunakan, dokumen kurikulum dan tulisan para stakeholder di ketiga institusi.

Data akan di analisis dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) Penyajian data; dan (3) Kesimpulan atau verifikasi” (Sugiono 2013; Sulaiman W., 2022b; Zainuddin et al., 2022; Mardhiah, A., 2022; Ainun Mardhiah & Sulaiman W. 2022).

Langkah terakhir dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan memverifikasi data dengan menggunakan metode: (a) metode triangulasi, yakni melakukan verifikasi data dengan berbagai sumber yang berbeda, (b) metode *membercheck* (Sugiyono 2018), yakni melakukan pengecekan keabsahan data dengan mengembalikan hasil temuan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya.

D. HASIL PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti memilih IAIN Langsa, IAIN Lhokseumawe, dan STAIN Gajah Putih Takengon sebagai objek penelitian, pada uraian berikut peneliti juga memaparkan data mengenai kurikulum pembelajaran pluralisme pada PTKIN tersebut. Berikut sekilas profil dan kurikulum pembelajaran Pluralisme IAIN Langsa, IAIN Lhokseumawe, dan STAIN Gajah Putih Takengon.

IAIN Langsa merupakan PTKIN yang berada di Aceh, tepatnya di Langsa. Didirikan pada tahun 1980 yang awalnya merupakan kampus swasta dengan nama Institut Agama Islam Zawiyah Cot Kala. Resmi terdaftar pada Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI pada tanggal 16 April 1983 dengan status Sekolah Tinggi Agama Islam. Kemudian tanggal 28 Desember 2006 STAI Zawiyah Cot Kala berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Selang beberapa tahun kemudian STAIN Zawiyah Cot Kala pada tanggal 17 Oktober 2014 menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa dan aktif hingga sekarang (Lembaran Negara RI No.287 2014).

Kota langsa merupakan salah satu daerah di Aceh dengan persentase penduduk hiterogen yang tinggi, di dalamnya bercampur berbagai suku dan agama. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi sistem tatanan sosial baik itu di lingkungan kerja maupun lingkungan kampus.

Penerapan kurikulum pluralisme di IAIN dapat dilaksanakan dengan mudah. Dengan penerapan kurikulum tentang pluralisme ini menjadikan lingkungan kampus menjadi lebih harmonis antara mahasiswa dan dosen. Di samping itu IAIN Langsa juga sudah memiliki lembaga Gender dan Anak. Melalui lembaga ini akan memperkuat kerukunan dan persamaan satu sama lainnya. IAIN Langsa juga memiliki pusat studi Pancasila yang sudah mampu mewarnai kampus dengan 4 pilar kebangsaan yaitu cinta NKRI, bhineka tunggal ika, internalisasi UUD 1945 dan pancasila.

IAIN Lhokseumawe adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang merupakan perubahan bentuk dari Akademi Ilmu Agama (AIA) yang didirikan pada tanggal 12 Juni 1969. Setelah 3 (tiga) tahun kemudian menjadi Perguruan Tinggi Malikussaleh (PERTIM) hasil dari musyawarah para tokoh di wilayah Aceh Utara. Pada tahun 2005 Perguruan Tinggi Malikussaleh merubah status menjadi perguruan tinggi Islam negeri dengan nama lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe. Kemudian beralih status menjadi IAIN Lhokseumawe melalui Perpres Nomor 72 tahun 2016 dan aktif hingga sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan rektor 1 (satu) dalam penerapan pluralisme IAIN Lhokseumawe tentu sangat terbuka. Disamping menerima mahasiswa yang berlatar belakang agama Islam kampus IAIN Lhokseumawe juga berkewajiban untuk menerima mahasiswa non muslim untuk kuliah di sini. Namun demikian sampai saat ini belum ada yang non Islam mendaftar kuliah di sini. Sikap ini kita lakukan untuk menjawab aturan undang-undang melalui kementerian Agama.

Sementara itu terkait dengan kebebasan yang sudah ada di sini yaitu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memakai cadar, dan mengikuti organisasi yang dia sukai. Disamping itu kita juga ikut mendorong para tenaga pengajar yaitu dosen untuk tidak memaksakan kehendaknya dan pandangannya kepada mahasiswa baik utamanya dalam masalah paham Fikih. Sehingga sampai saat ini di kampus IAIN Lhokseumawe belum ada muncul paham radikalisme.

Untuk langkah lebih jauh IAIN Lhoksumawe sudah mulai untuk mewujudkan “rumah moderasi” bagi seluruh mahasiswa dan dosen untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing sehingga perbedaan dapat menjadi satu. Namun demikian mengingat adanya

perbedaan pandangan masyarakat sekitar kampus dengan konsep “Rumah Moderasi”, mereka belum bisa menerima rumah moderasi, masyarakat menganggap rumah moderasi itu adalah bentuk pemaksaan ideologi pancasila, sehingga program “Rumah Moderasi kita tunda”

Dosen juga diharapkan untuk mengintegrasikan materi-materi yang berkaitan dengan perbedaan agama dengan cara memahami kepada mahasiswa bahwa kita hidup di negara yang memiliki beragam macam agama yang terdiri dari Islam, Kristen, Budha, Hindu, Kong Hu Cu, dan Katolik. Sehingga berbagai macam sudut pandang akan lahir dan perbedaan pun akan muncul, maka dibutuhkan sebuah kemampuan untuk menghadapi setiap perbedaan dengan nalar berpikir yang baik.

IAIN Takengon adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berlokasi di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Awal berdirinya IAIN Takengon bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) yang didirikan pada tahun 1986. Terdaftar di Kementerian Agama tanggal 12 September 1989. Pada tahun 2002 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Gajah Putih Takengon. Kemudian pada tahun 2012 terbitlah Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 2012 bahwa Status STAI Gajah Putih Takengon dari swasta berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih Takengon dan aktif hingga sekarang.

Dalam upaya menerapkan kurikulum pluralisme di IAIN Takengon Wakil Rektor 1 (satu) sangat mendukung proses pendidikan inklusif di kampus. Hal ini ditunjukkan melalui adanya kurikulum di kampus yang berbasis moderasi beragama, pihak kampus juga selalu menekankan pada semua tenaga pengajar sebagai dosen untuk selalu mendukung program moderasi beragama dalam segala kegiatan di kampus. Bahkan pada tingkat pimpinan, moderasi beragama acap kali menjadi slogan sehinggamenyebabkan topik ini menjadi tidak menarik, karena begitu seringnya kegiatan tersebut. Terkadang bukan tidak mungkin konsep moderasi akan melahirkan “Radikal Moderat”, karena panggung moderasi hanya milik kalangan tertentu, yang lain tidak dapat menyampaikan pendapat. Dengan kata lain memaksakan kehendak diri untuk menerima konsep moderasi yang sudah dirumuskan. Inilah yang disebut akan melahirkan “Radikal Moderat. Walau demikian di kampus IAIN Gajah Putih Takengon para dosen juga di dorong untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan moderasi. Oleh karena itu, pihak kampus memberikan ruang berupa moderasi beragama dengan tujuan menghargai setiap pandangan, baik dalam masalah Fikih maupun Usul Fikih. Sejatinya disadari bahwa tidak bisa menganggap perbedaan itu adalah musuh, karena perbedaan itu adalah bagian dari kehidupan yang kita jalani. Dengan demikian

jadikanlah perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. inilah budaya akademik bahwa perbedaan itu dapat diselesaikan dengan nalar dan argumentasi yang baik.

1. Strategi Penerapan Kurikulum berbasis Islam Inklusif

Kurikulum adalah hal yang sentral dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di setiap jenjang pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Keberadaan kurikulum memastikan bahwa kegiatan pendidikan dan pengajaran berada pada jalur yang tepat (*keep on track*), sesuai dengan makna etimologis dari kurikulum sebagai “tempat laluan berpacu”. Selain itu bagi perguruan tinggi, kurikulum juga menjadipenciri dari masing-masing perguruan tinggi.

Kurikulum berbasis Islam inklusif adalah *track* guna menghasilkan peserta didik yang mampu menerima kemajemukan, baik dari sisi agama, ras, suku, golongan, budaya, dan keadaan fisik, sehingga berimplikasi pada kemandirian dalam bersikap, kepekaan pada realitas sosial, serta keberanian dalam bertindak. Lebih lanjut, kurikulum ini adalah corak yang paling cocok bagi kultur Indonesia yang majemuk akan agama, etnik, serta budaya.

Cita-cita pelaksanaan Islam inklusif sudah tergambar secara eksplisit melalui visi IAIN Langsa, yaitu “Menjadi pusat kajian keislaman yang berkarakter rahmatan lil alamin” (Kementerian Agama RI. 2017). Rahmatan lil ‘alamin didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan karakteristik yang dapat bermanfaat, menebarkan kebijaksanaan dan kesejukan bagi seluruh makhluk, mengintegrasikan iman, ilmu, akhlak, dan hikmah, dengan teknologi dan seni sehingga menghasilkan keluaran yang bermanfaat dan tidak terpapar dengan paham ekstrimisme (IAIN Langsa 2018).

Kurikulum berbasis Islam inklusif yang dilaksanakan oleh IAIN Langsa dalam bentuk pemberian mata kuliah. Matakuliah yang ditawarkan oleh institut di antaranya: ‘Ulumul Qur’an, ‘Ulumul Hadits, Ilmu Kalam, Metodologi Studi Islam, dan Sejarah Peradaban Islam diberikan untuk memberikan pemahaman *washatiyyah* (moderat) terhadap agama Islam. Lebih lanjut, Fakultas Syariah mengisi struktur kurikulumnya melalui matakuliah *Ushul Fiqh* agar mahasiswa memahami dasar-dasar pengambilan hukum, sehingga mahasiswa tidak memiliki fanatisme berlebihan terhadap satu sekte atau mazhab.

Selain itu, sebagai bentuk implementasi Islam inklusif, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah menawarkan matakuliah Islam dan Budaya Lokal. Pemberian mata kuliah ini adalah upaya yang ditempuh oleh Fakultas untuk mengajak para mahasiswa menyelami dan memahami keislaman dalam corak kebudayaan yang ada di Indonesia, sesuai dengan kearifan lokal, seperti praktik *peusujuk*, *yasinan*, *muludan*, dan sebagainya. Lebih lanjut, diharapkan mahasiswa mampu memahami keragaman pemahaman keIslaman yang ada di Indonesia. Akan tetapi, struktur kurikulum inklusif secara utuh masih belum terlihat. Kurikulum yang

diterapkan di IAIN Langsa masih diberikan keleluasaan kepada fakultas untuk menafsirkan inklusivitas berdasarkan kebutuhan dan kompetensinya masing-masing.

Hampir senada dengan yang dilakukan oleh IAIN Langsa, format pelaksanaan kurikulum berbasis Islam inklusif pada IAIN Lhokseumawe juga masih pada tataran pemberian mata kuliah. Zulfikar Ali Buto, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan memberikan contoh pelaksanaan pendidikan inklusif dalam bentuk mata kuliah Studi Agama yang ditawarkan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini diberikan dalam rangka memberikan perspektif yang beragam dari agama yang berbeda-beda. Ali Buto mencontohkan “Misalnya, bagaimana surga dalam perspektif Islam dan bagaimana surga dalam perspektif non muslim. Karena sama-sama memahami adanya surga (Buto 2021).

Selain itu, kurikulum inklusif diberikan melalui integrasi dalam materi ajar. Artinya, materi ajar diarahkan untuk dibahas dari berbagai sudut pandang. Termasuk sudut pandang agama. Fokusnya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa dalam konteks Indonesia, mahasiswa tidak cukup hanya mengetahui dari perspektif Islam saja, namun juga perlu mengetahui dari perspektif agama lain sebagai pengetahuan,

Kurikulum berbasis Islam inklusif pada IAIN Takengon diterjemahkan melalui pemahaman Islam dalam konteks budaya lokal, dalam hal ini adalah budaya Gayo sebagai suku mayoritas di Aceh Tengah. Perguruan tinggi ini memasukkan matakuliah Studi Budaya dan Literatur Gayo sebagai matakuliah wajib institusi. Wakil Rektor Bidang Akademik menjelaskan bahwa matakuliah ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa bahwa perbedaan budaya adalah hal yang esensial untuk dipahami sehingga mampu menyikapi perbedaan tersebut secara benar (Musanna 2021). Kecenderungan pada budaya Gayo sebagai pilihan amat mudah dipahami, disebabkan karena Gayo adalah suku mayoritas yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, bahkan sampai ke kabupaten/kota sekitar seperti Kabupaten Bener Meriah dan Gayo Lues.

Dari uraian di atas tampak bahwa strategi pelaksanaan kurikulum berbasis Islam inklusif di ketiga perguruan tinggi di atas belum dilaksanakan dalam bentuk *formal curriculum* dan tidak disebutkan secara resmi dalam dokumen kurikulum. Akan tetapi, corak implementasi kurikulum berbasis Islam inklusif sudah dirintis pada *hidden curriculum* dengan membentuk suasana pembelajaran yang multikultural. Nuansa kemajemukan juga dapat dirasakan dalam lingkungan perkuliahan di ketiga perguruan tinggi di atas. Mahasiswa yang berkuliah di kampus tersebut sudah berasal dari berbagai daerah dan suku. Begitu pula dengan para pengajarnya yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Hanya saja, belum

ditemukan mahasiswa yang beragama non-Islam, meskipun para pimpinan menyebutkan tidak ada peraturan, baik peraturan pusat maupun institusional yang melarang mahasiswa non-Islam untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Kurikulum berbasis Islam Inklusif

Pelaksanaan kurikulum berbasis Islam inklusif adalah upaya dan terobosan yang dilakukan untuk membentuk mahasiswa yang menjunjung tinggi dan menghargai keberagaman. Ini merupakan cita-cita yang mulia dalam rangka mewujudkan insan akademis yang Islami dan Pancasila serta menghargai kebinekaan sebagai salah satu rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Namun demikian, pelaksanaan ini menghadapi tantangan, di samping juga potensi yang mendukung terwujudnya kurikulum berbasis Islam inklusif ini.

Sebagai perguruan tinggi yang berlokasi di daerah dengan radius yang tidak jauh dari Provinsi Sumatera Utara, IAIN Langsa telah akrab dengan kemajemukan. Kota Langsa sebagai lokasi IAIN Langsa adalah salah satu kota yang paling heterogen yang ada di wilayah Provinsi Aceh (Hamid 2017). Sedikit berbeda dengan IAIN Takengon yang relatif lebih homogen karena berada tepat di tengah Provinsi Aceh dengan keadaan geografis dataran tinggi, sehingga lebih didominasi oleh penduduk lokal.

Faktor pendukung juga muncul dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Sejak tahun 2019, Kementerian Agama gencar mencanangkan program Moderasi Beragama. Salah satu tujuan dari pelaksanaan program ini adalah menghasilkan pendidikan Islam yang inklusif, pendidikan yang mampu mengakomodasi berbagai keberagaman yang ada. Kementerian Agama menyebutkan ada empat indikator moderasi beragama, yaitu: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi 3) anti-kekerasan, dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Lebih lanjut, Kementerian Agama juga mendorong berdirinya Rumah Moderasi Beragama di setiap perguruan tinggi keagamaan di seluruh Indonesia melalui Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama (Kemenag RI 2019). Akan tetapi, sampai dengan Agustus 2020, baru 15 perguruan tinggi keagamaan yang telah memiliki Rumah Moderasi Beragama ini.

Selain faktor pendukung, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kurikulum berbasis Islam inklusif ini. Hal yang paling utama adalah terlalu dinamisnya kurikulum pendidikan di Indonesia yang menyebabkan sering berubah-ubahnya kurikulum yang sedang berjalan. Perubahan yang cepat tanpa evaluasi yang komprehensif ini menyebabkan keengganan para akademisi untuk menyahutinya secara proaktif. Salah satu

akademisi mengibaratkan pelaksanaan kurikulum pendidikan di Indonesia hanya sebagai wacana musim semi.

Lebih lanjut, masih adanya polarisasi pemahaman terhadap makna Islam inklusif juga menjadi faktor penghambat yang serius. Di satu sisi, sebagian akademisi memahami makna inklusif dengan nada yang miring, namun di sisi lain ada pula akademisi yang bersemangat menyahuti hal ini. Bahkan, masih sebagian besar masyarakat sekitar yang belum menerima pengistilahan “Islam inklusif” karena *term* ini dipersepsikan berbeda. Mereka menganggap bahwa inklusivitas dan moderasi beragama adalah hal yang negatif. Istilah inklusif ini dianggap sebagai bentuk pelaksanaan praktik keislaman yang lemah dan tidak *kaffah*. Tentu hal ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan, karena akhir-akhir ini publik sering mendapatkan polarisasi informasi dari berbagai sumber dan media.

E. KESIMPULAN

Pendidikan bercorak pluralis dilaksanakan dengan cara: (a) mengakui keberagaman latar belakang dari tiap-tiap dosen dan mahasiswa dengan segala perbedaannya; (b) mendorong secara spesifik agar tiap-tiap dosen dan mahasiswa untuk saling menghargai; (c) membuka akses partisipasi pemahaman moderasi bagi mahasiswa.

Penerapan kurikulum berbasis inklusif masih cenderung dilaksanakan dalam bentuk *hidden curriculum*, sementara pelaksanaan kurikulum formal masih terbatas dalam pemberian beberapa mata kuliah saja. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif adalah adanya peraturan berupa program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI, sementara faktor penghambat muncul dari kesalahpahaman dan stigma negatif yang muncul dari tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng Muchtar Ghazali, Ed. 2008. *Otonomi Pendidikan*. Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati.
- Ainiyah, Nur. 2013. “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam.” *Al-Ulum* 13 (1): 25–38.
- Ainun Mardhiah & Sulaiman W. 2022. “PEMBENTUKAN PERILAKU NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM BAGI ANAK SEJAK DINI MELALUI KELUARGA YANG BERKUALITAS.” *Serambi Tarbawi* Nomor: 10 (2): 153–64. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i2.4766>.
- Alexander, J. Galen Sailor and William M. 1974. *Planning Curriculum for School*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- AR, Nurdin, Siti Yusnaini, Anton Widyanto, Warul Walidin, and Sulaiman Sulaiman. 2021. “THE INTERFAITH HARMONY IN ACEH PROVINCE (The Analysis of the

- Strategies, Roles of FKUB, and Barriers)." *Ulumuna* 25 (2): 306–28. <https://doi.org/10.20414/ujis.v25i2.457>.
- Arifin, Zainal. 2018. *Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: UIN Pres.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir, Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Buto, Zulfikar Ali. 2021. "Wawancara Dengan Zulfikar Ali Buto. Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kelembagaan IAIN Lhokseumawe, Aceh."
- Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Alih Bahasa Achmad Fawaid, Cet. 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dakir. 2004. *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eliade, Mircea. 1987. *Encyclopedia of Religion, Vol. 12*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Febriyando. 2021. "Optimalisasi Seni Dan Budaya Dalam Mitigasi Teror Dan Radikalisme." *Al-Ulum* 21 (2). <https://doi.org/10.30603/au.v21i2.2393>.
- H.A.R.Tilaar. 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haekal, T. M., Sulaiman W, Abdul Hafiz, Pandu Adi Cakranegara, and Susilo Surahman. 2022. "Principal Policy Analysis in The Management of Distance Learning in The Covid-19." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6 (1): 218–27. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i1.3320>.
- Hamid, Marzuki. 2017. "Membangun Langsa Lewat Keberagaman." 2017. <https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/membangun-langsa-lewat-keberagaman>. Diakses 17 Agustus 2021.
- Ichtiyanto. 2005. *Masyarakat Majemuk Dan Kerukunan Hidup Beragama Dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ishak, I., & W., S. 2022. "Eksistensi Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4 (5): 800–807. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6711>.
- Kemenag RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*. Nomor 14 Tahun 2017.
- Langsa, IAIN. 2018. *Borang Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Langsa*. Langsa, 2018.
- Lembaran Negara RI. No. 287, 2014. "Peraturan Presiden RI. No. 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi IAIN Lanagsa" https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/perpres_146_14.pdf. Diakses 17 Desember 2022.
- M, Rasjidi. 1968. *Al-Djami'ah*, Nomor Khusus, Mei, 1968, VIII, 35.
- Manser, Martin Hugh. 1995. *Oxford Learner Pocket Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Mardhiah, A., Sulaiman W., & Nurbaiti. 2022. "Peningkatan Kemampuan Membaca Dan Menghafal Alquran Dengan Menggunakan Strategi Reading Aloud Bagi Siswa Kelas VI SDN 6 Kualasimpang." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4 (4): 2282–2295. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5762>.
- Margono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2002. *Lexy, Qualitative Research Methodology*. Bandung: Rosdakarya Teens.

- Musanna, Al. 2021. "Wawancara Dengan Al Musanna, Wakil Rektor Bidang Akademik IAIN Takengon."
- Nasikun. 2008. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Osman, Muhammad Fathi. 2006. *Islam, Pluralisme Dan Toleransi Keagamaan*. Jakarta Selatan: PSIK Universitas Paramadina.
- Qoumas, Yaqut Cholil. 2021. "Menag Minta PTKIN Jadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama." <https://www.kemenag.go.id/read/menag-minta-ptkin-jadi-pusat-pengembangan-moderasi-beragama>, Menag Minta PTKIN Jadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama, Diakses Jumat 17 Desember 2021.
- Rachman, Budhy Munawar. 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Sachedina, Abdulaziz. 2014. "DIALOGICAL CONVERSATION TO SEARCH FOR PRINCIPLES OF INTERFAITH RELATIONS: THE FUTURE OF PLURALISTIC WORLD ORDER." *KUFA REVIEW* 7 (1): 17–44. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/Kufa_Review/article/view/4486 (Accessed: 17 December 2022).
- Sarifudin, Sarifudin, and Rahendra Maya. 2019. "IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMASARAN JASA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN DI MADRASAH ALIYAH TERPADU (MAT) DARUL FALLAH BOGOR." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2 (02): 133. <https://doi.org/10.30868/im.v2i02.513>.
- Shihab, Muhammad Quraisy. 2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Shofan, Moh. 2011. *Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Statistik, Badan Pusat. 2017. "Statistik Politik 2017." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/22/da332e4125b26eb9dd0870ce/statistik-politik-2017.html>.
- Subkhan, Imam. 2007. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiono. 2013. *Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Toto. 2018. "Transnational Islamic Education in Indonesia: An Ideological Perspective." *Contemporary Islam* 12 (2): 101–22. <https://doi.org/10.1007/s11562-017-0409-3>.
- Sulaiman W. 2022a. "Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Pendekatan Quantum Teaching Pada Siswa Kelas III MTs. Harapan Mutiara Kecamatan Seruway Aceh Tamiang." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4 (5): 28–38. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6540>.
- . 2022b. "Penerapan Pendidikan Islam Bagi Anak Di Usia Emas Menurut Zakiah Dradjat." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6 (5): 3953–66. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2418>.
- Sulaiman W. 2022a. "Menyemai Nilai-Nilai Moralitas Pendidikan Islam Anak Sejak Dini Dalam Membangun Masa Depan Bangsa Yang Multikultural." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling Section): 2048–55. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4>.
- . 2022b. "Pengembangan Kurikulum: (Sebagai Peran Guru Profesional)." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* Volume 4 N. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2605>.
- . 2022c. "Implementasi Landasan Pengembangan Kurikulum MAN 1 Aceh Tamiang." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4 (2): 2697–2703. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2605>.

- . 2022d. “Konsep Moderasi Beragama Dalam Pandangan Pendidikan Hamka.” *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4 (2): 2704–14. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2593>.
- Supriadi, Fasli Jalal and Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusantara.
- Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijaya-Mukti, Krishnanda. 2003. *Wacana Buddha Dharma*. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan.
- Yusuf Mundzirin, Dkk. 2005. *Islam Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Zainuddin & Sulaiman W. 2022. “Menyelisik Ajaran Multikultural Melalui Pendidikan Islam.” *Pendidikan Dan Konseling* 4 (5): 2833–37. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7035>.
- Zainuddin, Sulaiman W., Musriparto Musriparto, and Muhammad Nur. 2022. “Solusi Pembentukan Perilaku Nilai Moral Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Islam.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6 (5): 4335–46. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2606>.